



**BUPATI POHUWATO**

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk mendanai kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - b. berdasarkan ketentuan huruf F, Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah butir 1 huruf f angka 26) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mengatur Tata cara penganggaran penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran berikutnya, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya

PARAF	
OPD	Perancang

dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PARAF	
OPD	Perancang PLU
A	8

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 245).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

PARAF	
OPD	Perancang PIUU
	

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp. 916.494.810.734,-
  - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pendapatan Daerah  
setelah Perubahan Rp. 916.494.810.734,-
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp. 939.851.147.734,-
  - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.075.814.533,-

Jumlah Belanja Daerah  
setelah Perubahan Rp. 944.926.962.267,-
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan Pembiayaan
    1. Semula Rp. 30.356.337.000,-
    2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.075.814.533,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan  
setelah Perubahan Rp. 35.432.151.533,-
  - b. Pengeluaran Pembiayaan
    1. Semula Rp. 7.000.000.000,-
    2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan  
setelah Perubahan Rp. 7.000.000.000,-



Jumlah Pembiayaan Netto

    1. Semula Rp. 23.356.337.000,-
    2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 5.075.814.533,-

Setelah Perubahan Rp. 28.432.151.533,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
Setelah Perubahan Rp. 0,-

2. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang di Klasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	





LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TANGGAL : 21 Februari 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>86.170.265.470</b>	<b>86.170.265.470</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	19.704.379.261	19.704.379.261	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	8.101.719.400	8.101.719.400	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000	3.800.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	54.564.166.809	54.564.166.809	0	0 %
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>812.626.445.000</b>	<b>812.626.445.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	777.626.445.000	777.626.445.000	0	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.000.000.000	35.000.000.000	0	0 %

PARAF	
OPD	PERANCANG
	DIJIL
	

<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>17.698.100.264</b>	<b>17.698.100.264</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.119.400.600	7.119.400.600	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.578.699.664	10.578.699.664	0	0 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>916.494.810.734</b>	<b>916.494.810.734</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>684.891.905.149</b>	<b>684.969.297.284</b>	<b>77.392.135</b>	<b>0,01 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	369.887.460.380	369.270.260.380	(617.200.000)	-0,17 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.213.825.514	289.893.718.114	679.892.600	0,24 %
5.1.03	Belanja Bunga	3.803.650.011	3.803.650.011	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	18.497.282.244	18.511.981.779	14.699.535	0,08 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.489.687.000	3.489.687.000	0	0 %
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>110.992.348.219</b>	<b>115.990.770.617</b>	<b>4.998.422.398</b>	<b>4,50 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.950.000.000	7.950.000.000	0	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.596.610.091	22.538.900.891	(57.709.200)	-0,26 %

	PARALE	
OPD	PERANCANG	
	PIU	
<b>A</b>		<b>B</b>



5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.480.661.350	17.500.023.050	19.361.700	0,11 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.688.065.778	63.724.835.676	5.036.769.898	8,58 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.277.011.000	4.277.011.000	0	0 %
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>140.466.894.366</b>	<b>140.466.894.366</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.780.609.866	2.780.609.866	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	137.686.284.500	137.686.284.500	0	0 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>939.851.147.734</b>	<b>944.926.962.267</b>	<b>5.075.814.533</b>	<b>0,54 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(23.356.337.000)</b>	<b>(28.432.151.533)</b>	<b>(5.075.814.533)</b>	<b>-21,73 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6,1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>30.356.337.000</b>	<b>35.432.151.533</b>	<b>5.075.814.533</b>	<b>16,72 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.356.337.000	35.432.151.533	5.075.814.533	16,72 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>30.356.337.000</b>	<b>35.432.151.533</b>	<b>5.075.814.533</b>	<b>16,72 %</b>
<b>6,2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>7.000.000.000</b>		<b>0 %</b>

6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>23.356.337.000</b>	<b>28.432.151.533</b>	<b>5.075.814.533</b>	<b>21,73 %</b>
<b>6,3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

<b>PARAF KOORDINASI</b>						
KABID <i>Atyga</i>	KEPALA ..... <i>BPKPD</i>	KABAG HUKUM <i>[Signature]</i>	ASISTEN PEMKESRA <i>[Signature]</i>	ASISTEN ..... <i>[Signature]</i>	SEKDA <i>[Signature]</i>	WABUP